



# **EVALUASI PROGRAM TAHUN 2025**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH  
KABUPATEN BANGKALAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penyusunan Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Evaluasi Program Kegiatan ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 merupakan informasi pencapaian indikator dan target kinerja dalam sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan. Laporan evaluasi program juga merupakan tolok ukur perbaikan atau menjadi acuan dalam peningkatan pencapaian program/ kegiatan untuk tahun selanjutnya.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman sebagai ukuran pencapaian kinerja BPKAD di masa yang akan datang.

Bangkalan, 30 Januari 2025

**KEPALA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN dan ASET  
DAERAH  
KABUPATEN BANGKALAN**



**AHMAT HAFID, SE, MM**  
NIP. 19690131 199003 1 003

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
▶ 1.1. Latar Belakang .....	1
▶ 1.2. Tujuan .....	1
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>5</b>
▶ 3.1. Permasalahan .....	5
▶ 3.2. Rekomendasi.....	5
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>6</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan serangkaian aktivitas dan alat yang terintegrasi dengan sistematis dalam rangka penetapan tujuan, pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) berperan dalam mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah, selain itu penerapan SAKIP juga berdampak pada penyusunan anggaran yang berdasarkan kinerja.

Pengukuran kinerja pada tahun 2025 dijabarkan dalam Laporan Evaluasi Program Tahun 2025 yang bertujuan untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama periode tahun berjalan. Laporan Evaluasi Program merupakan laporan hasil perencanaan kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Program ini memberikan informasi antara perencanaan yang ditargetkan dengan hasil pelaksanaan yang telah dicapai dalam 1 tahun dimana memuat berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

### **1.2. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Badan Pengelola Keuangan dan aset dDaerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki proses pelaksanaan program dan hasilnya;
2. Menuntun arah kebijakan dan inisiatif-inisiatif program dimasa yang akan datang;
3. Mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik, termasuk untuk menguji suatu teori sosial atau ekonomi;
4. Meningkatkan akuntabilitas.

## **BAB II**

### **CAPAIAN KINERJA**

Dalam rangka tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, maka visi dan misi harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategis. Visi dan misi tersebut dirumuskan menjadi sasaran Strategis BPKAD Kabupaten Bangkalan. Sasaran strategis 2024-2026 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis BPKAD Kabupaten Bangkalan. Yang memuat 2 sasaran strategis dan 3 program di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

Pengukuran kinerja terhadap 3 program dan 13 kegiatan menunjukkan bahwa secara umum BPKAD Kabupaten Bangkalan telah mencapai kinerja yang baik terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memiliki target rendah. Untuk memperoleh data capaian kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator-indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja tersebut.

Untuk mengetahui hasil kinerja BPKAD Kabupaten Bangkalan, maka ditetapkan standart pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Standar Pencapaian Kinerja**

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	86 % - 100 %	Sangat Berhasil
2	71 % - 85 %	Berhasil
3	56 % - 70 %	Cukup
4	< 55 %	Kurang

**Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui Inovasi, Perencanaan berkualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	a. Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,30	0,05	197,8%
		c. Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	57,41%	57,41%
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	a. Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,00	71,10	88,88%
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00	83,53	87,93%

**Tabel 2.3. Indikator Capaian Program Kinerja**

No	Program	Indikator Program	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	100%	415.674.992.242,00	100%	383.320.304.615,00	100%	93,19%
		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP						
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.057.835.300,00	57,41%	873.499.861,00	57,41%	82,57%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah	95,00	44.393.588.709,00	83,53	43.073.108.458,00	87,93%	98,11%

Berdasarkan Tabel 2.3. Evaluasi Program BPKAD sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mendapat predikat kinerja **“Sangat Berhasil”** dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Adapun capaian anggaran dalam dokumen Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025 pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 93,19% dari anggaran yang telah ditetapkan.

2. Program Pengelolaan Administrasi Aset mendapat predikat kinerja “**Cukup**” dengan nilai capaian kinerja sebesar 57,41% dari target yang ditetapkan. Capaian anggaran berdasarkan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025 pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebesar 82,57% dari anggaran yang telah ditetapkan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendapat predikat kinerja “**Sangat Berhasil**” dengan nilai capaian kinerja sebesar 87,93% dari target yang ditetapkan. Adapun capaian anggaran berdasarkan anggaran pada dokumen Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025 dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 98,11% dari anggaran yang ditetapkan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN & REKOMENDASI**

#### **3.1 PERMASALAHAN**

Beberapa permasalahan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis dan penggunaan sistem baru dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Pendataan dan penatausahaan aset yang belum tertib.

#### **3.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka rekomendasi yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan penyempurnaan perencanaan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) agar lebih realistis dan terukur.
2. Keikutsertaan bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menguasai pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar deviasi antara anggaran dan realisasi dapat diminimalkan.
4. Prioritas anggaran untuk sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan .
5. Melakukan pembenahan sistem pengelolaan aset (inventarisasi, penilaian, dan pelaporan).
6. Mengoptimalkan efisiensi belanja operasional tanpa mengurangi kualitas layanan pendukung.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala BPKAD atas capaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan dalam hal pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah. Substansi Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 secara umum menyampaikan informasi sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025;
- b. Indikator Capaian Program Kinerja BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025;
- c. Permasalahan dan Rekomendasi di BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025.

Dari hasil Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 diperoleh predikat kinerja sangat berhasil, cukup dan sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa program yang belum optimal dalam pencapaian kinerjanya. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan tingkat efektivitas pelaksanaan antar program, sehingga diperlukan upaya perbaikan terutama pada program dengan capaian kinerja kategori cukup agar dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

**KEPALA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN dan ASET  
DAERAH  
KABUPATEN BANGKALAN**



**AHMAT HAFID, SE, MM**  
NIP. 19690131 199003 1 003

**EVALUASI PROGRAM TAHUN 2025**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja PD yang Dievaluasi (2025)		Capaian (%)		Evaluasi
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	100%	1.371.940.820	100,00%	1.292.083.225	100%	94,18%	
		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	414.303.051.422	100,00%	382.028.221.390	100%	92,21%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu/Sesuai Ketentuan	100%	1.371.940.820	100,00%	1.292.083.225	100%	94,18%	<b>Koordinasi Perencanaan Anggaran terlaksanan sesuai dokumen perencanaan</b>
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	12.500.000	2	12.321.000	100%	98,57%	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	12.500.000	2	12.279.375	100%	98,24%	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	6.300.000	1	6.235.000	100%	98,97%	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	1	6.300.000	1	6.192.000	100%	98,29%	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1	25.000.000	1	24.864.000	100%	99,46%	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	1	48.500.000	1	47.974.200	100%	98,92%	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	441.900.000	2	429.255.000	100%	97,14%	

	Daerah tentang Penjabaran APBD								
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	430.200.000	2	365.898.500	100%	85,05%	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	381.582.950	1	380.440.150	100%	99,70%	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	2.125.250	1	1.972.000	100%	92,79%	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	2.580.600	1	2.444.000	100%	94,71%	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	2.452.020	1	2.208.000	100%	90,05%	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%	29.364.056	100,00%	27.013.700	100%	92,00%	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2	10.742.800	2	10.722.650	100%	99,81%	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2	1.920.900	2	1.920.900	100%	100,00%	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2	195.150	2	195.150	100%	100,00%	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2	4.570.150	2	4.570.150	100%	100,00%	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	1	1.420.150	1	-	100%	0,00%	

	Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1	1.565.050	1	1.565.050	100%	100,00%	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2	4.565.050	2	4.565.050	100%	100,00%	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	4.384.806	2	3.474.750	100%	79,25%	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	44.635.150	100,00%	42.342.229	100%	94,86%	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	1	-	1	-	100%	-	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	1	3.999.850	1	3.935.800	100%	98,40%	

	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran							
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	5.012.350	1	4.714.238	100%	94,05%	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	35.622.950	1	33.692.191	100%	94,58%	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	-	1	-	100%	-	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%	414.229.052.216	100,00%	381.958.865.461	100%	92,21%	<b>Penyaluran Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Mendesak serta Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota tersalurkan dengan baik</b>
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	398.071.704.700	4	367.615.695.778	100%	92,35%	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2	2.591.869.233	2	777.691.400	100%	30,01%	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	13.565.478.283	4	13.565.478.283	100%	100,00%	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.057.835.300	100,00%	873.499.861	100%	82,57%	<b>Aset Daerah yang bersertifikat sejumlah 776 bidang</b>
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100%	1.057.835.300	100,00%	873.499.861	100%	82,57%	

5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	306.349.500	2	304.679.500	100%	99,45%	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	14	3.450.000	14	2.970.000	100%	86,09%	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	700.385.800	5	522.970.911	100%	74,67%	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	3.450.000	4	2.542.000	100%	0,00%	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4	40.750.000	4	39.030.700	100%	95,78%	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	3.450.000	-	1.306.750	-	37,88%	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah	82,00	44.393.588.709	93,55	43.073.108.458	114,09%	97,03%	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	2.501.262	100,00%	2.481.000	100%	99,19%	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	686.112	2	678.000	100%	98,82%	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	605.050	1	601.000	100%	99,33%	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	605.050	1	601.000	100%	99,33%	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	1	-	100%	0,00%	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	-	1	-	100%	0,00%	

		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	605.050	6	601.000	100%	99,33%	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	-	8	-	100%	0,00%	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani secara tepat waktu	100%	40.051.547.692	100,00%	39.254.981.820	100%	98,01%	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	40.049.907.492	51	39.253.357.820	100%	98,01%	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	920.100	2	912.000	100%	99,12%	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	720.100	4	712.000	100%	98,88%	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dengan baik	100%	1.435.600	100,00%	1.416.000	100%	98,63%	<b>Anggaran dari kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdampak refocusing dan disesuaikan dengan kebutuhan</b>
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	717.800	1	706.000	100%	98,35%	
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14	717.800	14	710.000	100%	98,91%	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	22.241.800	100,00%	10.955.490	100%	49,26%	

5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	17.241.800	1	10.955.490	100%	63,54%	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	5.000.000	2	-	100%	-	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67	-	67	-	100%	-	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan	100%	386.849.929	100,00%	314.885.078	100%	81,40%	Beberapa sub kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah terhambat karena adanya refocusing anggaran
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	6.072.150	4	4.282.500	100%	70,53%	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	204.423.260	18	139.130.400	100%	68,06%	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	6.372.000	1	5.070.000	100%	79,57%	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	79.034.669	1	78.851.050	100%	99,77%	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2.822.850	1	2.820.000	100%	99,90%	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	7.875.000	4	4.587.000	100%	58,25%	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	80.250.000	4	80.144.128	100%	99,87%	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	-	2	-	-	-	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	3.782.743.635	100,00%	3.404.828.876	100%	90,01%	Anggaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdampak refocusing



									<b>kemudian disesuaikan dengan kebutuhan</b>
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	1.266.300	4	1.266.300	100%	100,00%	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	309.436.000	4	250.086.492	100%	80,82%	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	3.472.041.335	4	3.153.476.084	100%	90,82%	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	146.268.791	100%	83.560.194	100%	57,13%	<b>Beberapa pemeliharaan Barang Milik Daerah terhambat karena adanya refocusing anggaran</b>
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	50.590.191	22	36.007.397	100%	71,17%	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51	51.928.600	51	14.612.506	100%	28,14%	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167	36.350.000	167	30.119.291	100%	82,86%	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	7.400.000	1	2.821.000	100%	38,12%	